

BAB V

RANCANGAN PUBLIKASI

5.1. Abstraksi

5.1.1 Abstraksi Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh General Government Spending Daerah, Pendapatan Perkapita Daerah, Analisis Varians Belanja KPP Terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Di KPP, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan Badan Pusat Statistika, Laporan keuangan DJP tahun 2016 – 2018 dan Laporan keuangan pemerintah Daerah, sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga sampel yang didapat adalah 30 daerah, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *general government spending* terhadap efektivitas pendapatan pajak di KPP dan tidak terdapat hubungan antara pendapatan perkapita daerah dan varians belanja KPP terhadap efektivitas pendapatan pajak di KPP, manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak, keterbatasan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* membuat sampel penelitian ini kurang mampu menggeneralisasi populasi penelitian, serta sampel yang diambil dibatasi dengan kurangnya data yang tersedia terhadap produk domestik regional bruto di setiap kabupaten atau kota sehingga penelitian ini hanya berfokus pada satu daerah provinsi yang terdapat data, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian terhadap kabupaten/kota provinsi lain

Kata Kunci : *general government spending*, efektivitas pendapatan pajak, varians anggaran, pendapatan perkapita daerah.

5.1.2 Abstraksi Inggris

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of regional general government spending, regional per capita income, analysis of expenditure variance of the regional offices of KPP on the effectiveness of tax revenues at the regional offices of KPP. This study uses secondary data derived from reports from the Central Statistics Agency (BPS), DJP financial reports for 2016 – 2018 and Regional government financial reports, the sample was taken using the *purposive sampling* method so that the sample obtained was 30 regions, this study is a quantitative study with descriptive statistical analysis techniques, the results of this study indicate that there is a relationship between general government spending on the effectiveness of tax revenue in the regional office. KPP and there is no relationship between regional per capita income and KPP expenditure variance on the effectiveness of tax revenues at the KPP regional office, the benefit of this research is to be able to become the basis for further research and provide input to employees.

government to be able to increase tax revenue, the limitation in this study is the purposive sampling method makes the sample of this study less able to generalize the study population, and the sample taken is limited by the lack of available data on the gross regional domestic product in each district or city so this research only focuses in one provincial areas where there is data, it is hoped that further research can be conducted on another provincial areas

Keywords: general government spending, tax revenue effectiveness, budget variance, regional per capita income,

5.2. Tinjauan Teori

5.2.1 Teori *Displacement Effect*

Teori displacement effect merupakan teori yang dicetuskan oleh Peacock dan Wiseman pada tahun 1961, teori ini didasarkan pada *wagner's law*, yang menyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula belanja/pengeluaran pemerintah, dimana teori *displacement* ini menyatakan bahwa terdapat tingkat resistensi dalam membayar pajak sehingga apabila negara dalam keadaan tertentu menaikkan pendapatan perpajakan untuk meningkatkan belanja pemerintahan maka masyarakat memiliki tingkat tertentu dimana mereka merasa bersedia membayar pajak sehingga disitulah tercipta keseimbangan dalam pembayaran pajak, namun apabila terjadi kenaikan pajak maka *displacement effect* akan terulang lagi. Selain dalam teori tersebut menurut Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pemerintah cenderung untuk meningkatkan penerimaan perpajakan meskipun presentase pembayaran pajak tidak berubah, namun pengeluaran pemerintah juga semakin membesar. Teori ini diperkuat dengan pendapat Friedman (Friedman, Summer 1978) menaikkan pajak tidak akan dapat menutupi defisit, dengan meningkatkan pajak maka justru malah meningkatkan pengeluaran pemerintah, maka pemerintah harus menekan defisit sebaik mungkin sehingga diterima oleh masyarakat, maka dalam meningkatkan penerimaan perpajakan pemerintah tidak harus selalu meningkatkan presentase dari pajak itu sendiri namun harus memperkuat kemampuan/kapasitas dari pemungutan pajak, maka dalam teori ini terdapat hubungan dengan penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui apakah dengan meningkatnya belanja pemerintah dapat mempengaruhi Pendapatan Pajak Di KPP.

5.2.2 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata – rata penduduk di suatu negara yang didapat dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk, pendapatan perkapita memiliki beberapa manfaat (Muchtolifah, 2010) yaitu :

- f. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara
- g. Mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu Negara selama satu tahun.
- h. Sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting, karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan dan kelemahan ekonomi negara tersebut.
- i. Dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonominya.

j. Mengukur tingkat inflasi yang sedang terjadi

Pendapatan per kapita merupakan gambaran/indikator dari pertumbuhan suatu ekonomi di negara menurut hukum Wagner's pengeluaran pemerintah semakin meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan dari pengeluaran pemerintah itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hal ini dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Barro (Barro, 1990) hal ini disebabkan dengan adanya pengeluaran pemerintah yang menginvestasikan pada infrastruktur, kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan modal sumber daya manusia yang akan berdampak pada kenaikan pendapatan perkapita, dan sumber dana dari pengeluaran pemerintah/belanja pemerintah tersebut didapat dari penerimaan perpajakan.

5.2.3 Analisis Varians Anggaran

Anggaran merupakan rencana finansial untuk masa yang akan datang, anggaran juga dapat membantu mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya (Hansen & Mowen, 2007), tidak berbeda dengan perusahaan, pemerintah juga diwajibkan untuk menyusun anggaran dalam hal ini pemerintah juga diwajibkan untuk menyusun anggaran yaitu APBN yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam menggunakan APBN maka perlu diikuti tanggungjawab untuk menyusun Laporan Keuangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 5 ayat 1 bahwa komponen laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan dalam Pasal 5 ayat 2 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam penganggaran dikenal analisis varians anggaran, analisis varians anggaran merupakan perbandingan antara *standard cost* dengan performa sebenarnya (Shim & Siegel, 2005) sedangkan menurut Hansen, Don R. & Mowen Maryanne M. (Hansen & Mowen, 2007) varians adalah perbedaan antara biaya input sebenarnya dan dengan biaya yang direncanakan, kegunaan dari analisis ini adalah untuk dapat mengontrol biaya dan mengevaluasi dari performa/kinerja dengan membandingkan anggaran selain itu juga untuk membantu menentukan/pengambilan keputusan dan untuk memberikan motivasi bagi pegawai untuk mencapai target yang ditentukan. Dalam pemerintahan varians anggaran juga digunakan yaitu dalam bentuk laporan realisasi anggaran pengertian dari laporan realisasi anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pasal 1 angka 4 adalah "laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode" ketentuan lebih lanjut mengenai isi dari laporan realisasi anggaran adalah pada Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran berisi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya, dalam PSAP 02 bahwa Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah "memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Dalam PSAP 02 juga memuat manfaat dari laporan realisasi anggaran adalah menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi

dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 angka 2 “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”, yang dapat diartikan bahwa hubungan antara penggunaan anggaran terhadap kinerja pencapaian target DJP adalah menggunakan anggaran untuk memungut pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak negara.

5.2.4 General Government Spending

Government spending/ government expenditure adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam Undang – Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Keuangan Negara belanja pemerintahan dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja negara dan belanja daerah, dalam pengertian belanja negara dan belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut PSAP no.1 definisi dari belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui ketika terjadinya pengeluaran dari kas/ rekening negara atau daerah dimana pengakuannya harus dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh unit yang memiliki fungsi pembendaharaan. Belanja sendiri dalam diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi yang diklasifikasikan sebagai berikut :

PEMERINTAHAN PUSAT	PEMERINTAHAN DAERAH
Belanja Operasi: - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Bunga - Subsidi - Hibah - Bantuan Sosial	Belanja Operasi: - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Bunga - Subsidi - Hibah - Bantuan Sosial
Belanja Modal : - Belanja aset tetap - Belanja aset lainnya	Belanja Modal : - Belanja aset tetap - Belanja aset lainnya
Belanja Lain-lain :	Belanja Tak Terduga :

Belanja – belanja tersebut dikelompokkan dalam 3 macam yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal yang memiliki pengertian dalam PSAP Nomor 2 sebagai berikut :

4. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang Memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
5. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang Memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

6. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah melakukan belanja terhadap produk domestik bruto daerah maka digunakan indikator/ rasio General Government Spending yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara belanja pemerintah daerah terhadap PDRB tujuan dari pengukuran ini dapat diketahui bahwa semakin meningkatnya belanja pemerintah terhadap PDRB dan juga dapat digunakan untuk mengukur besar ukuran dari pemerintah dilihat dari seberapa besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan publik (OECD, 2013).

5.2.5 Pendapatan Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semakin tingginya pendapatan negara dari pajak maka akan mempermudah negara untuk dapat mengalokasikan dananya untuk menjalankan pemerintahan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Monsen, Mosayeb dan Yousef (Mehrara, Pahlavani, & Elyasi, 2011) Indonesia cenderung menerapkan sistem politik yang menentukan seberapa besar anggaran yang dikeluarkan dan selanjutnya akan mengatur peraturan perpajakan dan sumber pendapatan anggaran sehingga dapat membiayai anggaran (*spend and tax hypothesis*), penggunaan anggaran untuk kepentingan belanja negara dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pendapatan pajak masuk kedalam pendapatan LRA dan Pendapatan LO, basis akrual digunakan dalam pengakuan pendapatan LO dimana pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan dalam bentuk basis kas yang pengakuan pendapatan LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

5.2.6 Efektivitas Pendapatan Pajak

Efektivitas diukur dengan menilai apakah keluaran dapat berfungsi sebagaimana diharapkan sehingga mendatangkan hasil (outcome) yang diinginkan. Dengan demikian, dalam anggaran berbasis kinerja, tujuan dan indikator kinerja dari suatu program/kegiatan harus ditentukan dengan jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan (Nasution, 2019), tujuan dari adanya pengukuran efektivitas ini adalah untuk memenuhi pendekatan dalam penyusunan anggaran yang terdapat dalam UU no 17 Tahun

2003 Tentang Keuangan Negara salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya harus ditentukan target yang ingin dicapai dan nantinya akan menjadi evaluasi bagi pemerintahan dengan membandingkan realisasi pencapaiannya semakin dekat realisasi dengan targetnya maka akan semakin efektif kinerja pemerintahan, begitu pula dengan pendapatan pajak semakin dekatnya pendapatan pajak yang terealisasi maka semakin efektifnya pemerintah dalam memungut pajak. Dalam SAP 2019 efektivitas dan efisiensi merupakan manfaat informasi dari laporan realisasi anggaran yang dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi dari keputusan – keputusan dari penggunaan sumber daya ekonomi

5.3. Metode Penelitian

5.3.1 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

1. H1 : General Government Spending Daerah berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP
2. H2 : Pendapatan perkapita daerah berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP
3. H3 : Analisis Varians Belanja KPP berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP

5.3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2017 dan 2018 dimana tehnik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dimana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria – kriteria tertentu dari penelitian, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki Kantor Pelayanan Pajak pada tahun 2017 dan 2018

Tabel 5.1 Sampel Penelitian

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018
Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki Kantor Pelayanan Pajak	27	28
Outlier Data	(4)	(7)
Total Kabupaten/Kota Setelah Outlier	23	21
Total Keseluruhan Sampel	44	

5.3.3 Definisi Operasional Variabel

5.3.3.1 Variabel Terikat

1. Efektivitas Pendapatan Perpajakan Di KPP

Untuk mengukur efektivitas Pendapatan Perpajakan Di KPP maka menggunakan rasio seperti yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanti Dkk (Talondong, Morasa, & Tangkuman, 2018) :

$$\text{Efektivitas Pendapatan Perpajakan di KPP} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak KPP}}{\text{Target Penerimaan Pajak KPP}} \times 100\%$$

5.3.3.2 Variabel Bebas

1. General Government Spending Daerah

General Government Spending diukur menggunakan perbandingan antara belanja pemerintah daerah disbanding dengan PDRB yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{General Government Spending} = \frac{\text{Belanja Pemerintah Daerah}}{\text{Produk Domestik Regional Bruto}}$$

2. Analisis Varians Realisasi Belanja

Analisis Varians merupakan analisis perbandingan antara realisasi dengan penganggaran yang digunakan disini adalah presentase antaran anggaran belanja dengan realisasi belanja di setiap KPP penggunaan rumus varians adalah sebagai berikut :

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

3. Pendapatan Per Kapita Daerah

Pendapatan perkapita daerah merupakan pembagian antara produk domestic regional bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun tertentu maka perhitungan terhadap pendapatan per kapita daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan perkapita daerah} = \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk di suatu daerah}}$$

Dikarenakan hasil dari pendapatan perkapita memiliki nilai yang besar dan perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain signifikan maka digunakan logaritma natural (Ln) terhadap hasil dari PPD.

5.3.4 Teknik Analisis Data

1. Statistik deskriptif

Merupakan suatu metode analisis data kuantitatif yang ditujukan untuk memberikan gambaran umum atau deskripsi data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2016).

2. Uji Asumsi Klasik

Mengingat data yang digunakan adalah data sekunder maka sebelum melakukan pengujian regresi, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik guna mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Cara menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak maka digunakan analisis grafik

yaitu *normal Probability Plot (P-Plot)*. Pada grafik normal P-Plot, deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal grafik. Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan/tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memiliki residual yang tidak berdistribusi dengan normal, namun apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal tersebut, maka model regresi berdistribusi dengan normal dan memenuhi asumsi normalitas, Selain itu uji normalitas juga dilakukan dengan Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov dengan nilai normal apabila memenuhi persyaratan dibawah ini :

- c. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka data terdistribusi normal.
- d. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

4. Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel independen dengan model regresi. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor (VIF)* dan *tolerance (TOL)*. Jika nilai $TOL > 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Jika nilai $TOL < \text{atau} = 0,10$ maka terjadi multikolinieritas. Sedangkan apabila dilihat dari nilai VIF, jika nilai $VIF > \text{atau} = 10,00$ maka terjadi multikolinieritas. Dan jika nilai $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

5. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah didalam sebuah model regresi terjadi adanya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan *scatterplot* yaitu melihat pola penyebaran titik, dan juga dapat melalui uji statistik. Untuk *scatterplot*, peneliti melakukan analisis dengan melihat nilai prediksi ZPRED (variabel independen) dengan SRESID (nilai residual). Analisis dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Menurut Ghozali (2016) apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik. menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

6. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) pada data yang tersusun dalam rangkaian waktu (*time series*). Penggunaan metodenya adalah *Durbin Watson (DW)*. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas auto korelasi. Dengan ketentuan kriteria yang dihasilkan sebagai berikut :

- a. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b. Angka DW diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi
- c. Angka DW > 2 berarti ada autokorelasi negatif.

5.3.5 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t test)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% . Jika nilai signifikansi $< 0,10$ maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $> 0,10$ maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (Government spending daerah, pendapatan perkapita daerah dan analisis varians belanja KPP) terhadap variabel dependen (Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP). Berikut ini persamaan regresi berganda pada penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	: Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP
α	: Konstanta
β	: koefisien Variabel
X_1	: General Government spending daerah
X_2	: Pendapatan perkapita daerah
X_3	: Analisis Varians Belanja KPP
e	: error

5.4. Pembahasan dan Temuan

5.4.1 Gambaran Umum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari website resmi pemerintah, laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak, serta data – data dari Badan Pusat Statistika. Objek Penelitian ini adalah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki KPP dari tahun 2017- 2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dimana daerah yang diambil adalah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki KPP dari hasil tersebut terdapat total sampel sebanyak 55 yang memenuhi kriteria, di tahun 2017 sebanyak 27 dan pada tahun 2018 sebanyak 28 daerah, dengan dilakukan outlier data sebanyak 11 sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 44.

5.4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 5.2 Statistik Deskriptif

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
---	---------	---------	------	----------------

GGS	44	.015	.435	.07851	.077419
PPD(Ln)	44	16.647	20.342	17.77311	.892694
Varians	44	.831	.999	.96947	.033454
Efektivitas Pendapatan Pajak	44	.703	1.038	.86658	.092788
Valid N (listwise)	44				

1. General Government Spending Daerah (GGS)

General government spending merupakan perbandingan antara besarnya belanja/*expenditure* terhadap besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), perbandingan ini menunjukkan besarnya belanja pemerintah terhadap PDRB yang berarti perbandingan ini juga dapat memberikan seberapa besar jumlah yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan publik yang terhadap besarnya PDRB, semakin besarnya angka GGS maka semakin besarnya jumlah belanja yang dikeluarkan pemerintah berbanding dengan PDRB.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa GGS yang paling rendah ada pada 0.015 yang dilakukan oleh Kota pada tahun 2017, yang berarti pengeluaran/belanja pemerintah hanya sebesar 1,5% dari jumlah PDRB, sedangkan tertinggi ada pada 0,435 yaitu di Kota Pasuruan pada tahun 2017 yang berarti pengeluaran/belanja sebesar 43,5 % dari PDRB. Sedangkan nilai rata – rata pengeluaran pemerintah terhadap PDRB ada sebesar 0,0785 atau sebesar 7,85%, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,077 yang mendekati 0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi banyak variasi dalam data General Government Spending Daerah.

2. Pendapatan Perkapita Daerah (PPD)

Pendapatan perkapita daerah merupakan perhitungan rata – rata besarnya pendapatan penduduk di suatu daerah cara perhitungan dilakukan dengan perbandingan antara PDRB terhadap jumlah penduduk, dikarenakan jumlah hasil pendapatan perkapita nilainya besar dan terdapat perbedaan signifikan setiap daerah maka harus dilakukan/menggunakan logaritma Natural (Ln). dari tabel diatas diketahui bahwa pendapatan perkapita yang paling rendah adalah 16,647 yang ada pada Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2017, sedangkan yang paling tinggi adalah 20,342 yang ada pada Kota Pasuruan pada tahun 2018, sedangkan rata – rata pada PPD ini sebesar 17,77311, dan standar deviasi sebesar 0,892694

3. Varians Belanja KPP

Analisis Varians merupakan analisis perbandingan antara realisasi dengan penganggaran yang digunakan disini adalah presentase antaran anggaran belanja dengan realisasi belanja di setiap KPP, semakin mendekati 100% suatu relaisasi terhadap anggaran maka semakin baik kinerja suatu organisasi yang dalam penelitian ini adalah KPP. Dalam tabel diatas nilai terendah ada pada 0.871 yang ada pada daerah aceh pada tahun 2016, sedangkan nilai tertinggi ada pada 0.974 yang ada pada daerah Jawa Tengah pada tahun 2017 dari angka tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan anggaran belanja secara maksimal ada pada daerah Jawa Tengah dan pemenuhan anggaran minimal ada pada daerah Aceh, lalu nilai rata – rata varians ada pada nilai 0.89409, yang berarti nilai pelaksanaan anggaran belanja cukup tinggi secara rata – rata, sedangkan standar deviasi 0.019837.

4. Efektivitas Pendapatan Pajak

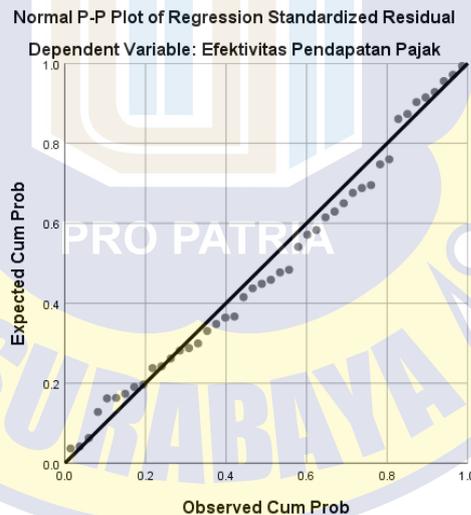
Efektivitas pendapatan pajak merupakan rasio antara realisasi pendapatan pajak dan anggaran/estimasi/target dari pendapatan pajak yang tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar keefektifan KPP dalam memungut pajak, dalam tabel diatas nilai minimum ada pada 0.703 yaitu Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sedangkan nilai tertinggi adalah 1.038, yaitu pada Kota Batu pada tahun 2017 sedangkan nilai rata – rata ada pada 0,86658 angka ini lebih rendah dari pada rata – rata varians belanja KPP, sedangkan nilai standar deviasi ada pada 0,092788.

5.4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak, dalam analisis grafik *normal Probability Plot (P-Plot)* dibawah ini terlihat bahwa titik tidak menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.

Grafik 5.1 Normal P-P Plot



Dalam uji Statistik Kolmogorov-Smirnov pada tabel dibawah ini dengan hasil nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,2 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,10

Tabel 5.3 Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0027209
	Std. Deviation	.05705499
Most Extreme Differences	Absolute	.086

	Positive	.080
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinieritas

Dalam Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat variabel independen yang berkaitan secara linear, untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai yang biasanya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 .

Tabel 5.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	GGS	.874
	PPD(Ln)	.874
	Varians	1.000

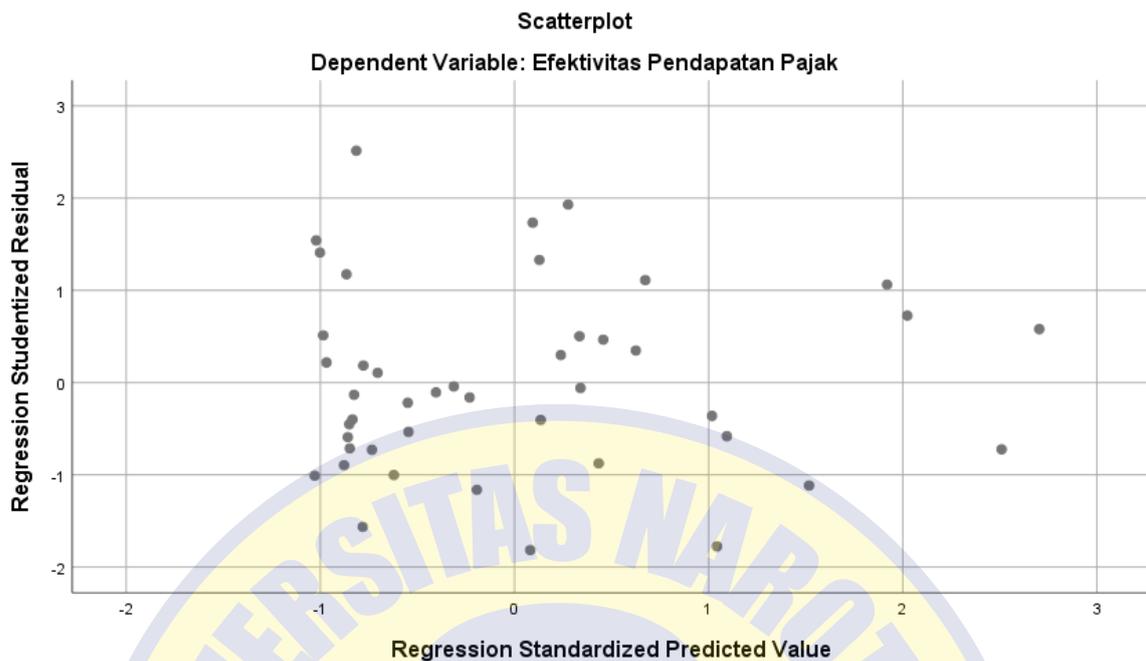
- a. Dependent Variable: Efektivitas Pendapatan Pajak

Dari hasil uji diatas dapat dilihat bahwa variabel – variabel diatas memiliki nilai VIF tidak terdapat nilai yang lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel dependen dengan independen tidak ada yang berkaitan secara linear maupun terdapat multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain, dasar analisis ini dilihat dari tabel dibawah ini adalah jika ada pola tertentu dari titik – titik maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, sedangkan berdasarkan tabel dibawah ini tidak terdapat pola yang jelas serta titik – titik tersebut menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Grafik 5.2 Hasil Uji Heterokedasitas



4. Uji Auto Korelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi dalam model regresi linear antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ /periode sebelumnya, pengujian yang digunakan adalah uji Durbin – Watson dimana nilai DW harus lebih besar dari nilai du dan lebih kecil dari nilai $4-du$ dari tabel dibawah ini nilai DW 1,734 adalah nilai du dengan jumlah sampel 44 adalah 1,6647 yang berarti telah terpenuhi $DW > du$ dan $DW < 4-du$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5.5 Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.492 ^a	.242	.185	.083751	1.734

a. Predictors: (Constant), Varians, PPD(Ln), GGS

b. Dependent Variable: Efektivitas Pendapatan Pajak

5.4.4 Hasil Estimasi dan Pembuktian Hipotesis

1. Uji Parsial (t test)

Uji ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial adalah 10% . selain itu juga dilakukan perbandingan antara nilai t hasil perhitungan dan nilai t dari nilai t tabel.

Tabel 5.6 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.199	.463		-.429	.670
	GGS	.305	.176	.254	1.726	.092
	PPD(Ln)	.054	.015	.520	3.533	.001
	Varians	.083	.382	.030	.217	.829

a. Dependent Variable: Efektivitas Pendapatan Pajak

Dari hasil uji tersebut diatas dapat dilihat bahwa hanya terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pendapatan pajak KPP yaitu variabel varians anggaran dengan nilai signifikansi $0,829 > 0,10$ lebih besar dari 10% dan nilai t hitung 0,217 dengan nilai t tabel yang digunakan adalah 1,68023 nilai t hitung, variabel anggaran varians $0,217 < 1,68023$. Terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan yaitu variabel Pendapatan Perkapita Daerah nilai signifikansinya adalah 0,001 dan nilai t hitung variabel Pendapatan Perkapita Daerah $3.533 > 1,68023$ lebih Besar dari nilai t tabel yang berarti berpengaruh positif dan nilai signifikan $0,001 < 0,10$ lebih kecil dari 10% berarti berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel *General Government Spending* dengan nilai signifikansi sebesar 0,092 dengan nilai t hitung sebesar 1.726 dengan nilai signifikansi tidak lebih besar dari 10% ($0,092 < 0,10$) karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel $1.726 > 1,68023$ maka hasilnya adalah variabel *General Government Spending* berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan Analisis Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel – variabel independen terhadap variabel dependennya, selain itu analisis ini juga digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independennya terhadap variabel dependen apabila nilainya positif maka hubungannya searah sedangkan apabila hubungannya negative maka hubungannya berlawanan, tabel dibawah ini merupakan hasil data yang diolah dengan regresi linier berganda.

Tabel 5.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.199	.463		-.429	.670
	GGS	.305	.176	.254	1.726	.092
	PPD(Ln)	.054	.015	.520	3.533	.001
	Varians	.083	.382	.030	.217	.829

a. Dependent Variable: Efektivitas Pendapatan Pajak

$$Y = -0,199 + 0,35GGS + 0,54PPD + 0,83Varians + e$$

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa persamaan tersebut memiliki hubungan antara variabel GGS, PPD, Varians yang dapat mempengaruhi Efektivitas Pendapatan pajak, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien pada variabel *General Government Spending* bernilai negatif menandakan hubungan yang berlawanan dan berpengaruh positif terhadap variabel Efektivitas Pendapatan Pajak.

2. Nilai koefisien pada variabel Pendapatan Perkapita Daerah pada persamaan regresi bernilai positif yang menandakan bahwa ada hubungan yang searah dan berpengaruh positif terhadap variabel efektivitas Pendapatan Pajak
3. Nilai koefisien pada variabel Varians Anggaran Belanja pada persamaan regresi bernilai positif yang menandakan bahwa ada hubungan yang searah dan berpengaruh positif terhadap variabel efektivitas Pendapatan Pajak searah dan berpengaruh positif terhadap variabel efektivitas Pendapatan Pajak

5.4.5 Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh General Government Spending terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Di KPP

Hasil penelitian uji statistic dalam tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi Pendapatan Perkapita adalah sebesar 0,092 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,10, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara General Government Spending terhadap efektivitas pendapatan pajak di KPP yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa terjadinya teori *displacement effect* dimana masyarakat memiliki batas tertentu dalam melakukan pembayaran pajak yang akan berpengaruh terhadap pemenuhan realisasi pendapatan pajak di KPP, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tria Sandi Kurniawan, dkk (Kurniawan, Sari, & Irmawati, 2020) bahwa terdapat hubungan antara belanja/pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak, hal ini disebabkan apabila pemerintah melakukan pembelanjaan terhadap pendapatannya maka masyarakat akan memberikan penilaian terhadap pembelanjaan tersebut yang menentukan ambang batas/keinginan dari masyarakat untuk secara sukarela membayarkan pajaknya. Hubungan signifikan positif yang ditunjukkan dalam nilai t hitung dengan nilai sebesar 1,726 dan nilai regresi sebesar 0,35 menunjukkan bahwa setiap kali ada kenaikan terhadap GGS sebesar 3,5% maka terdapat kenaikan terhadap efektivitas pendapatn pajak sebesar 1% dan sebaliknya, pembelanjaan daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer merupakan komponen dari pembelanjaan daerah, setiap semua pembelanjaan daerah yang dikeluarkan akan meningkatkan pendapatan pajak, hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen (pertumbuhan dari dalam) (Snowdon & Vane, 2005) bahwa setiap jenis pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan berputar kedalam masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka pajak yang akan dibayar juga semakin meningkat yang menyebabkan pendapatn pajak yang diterima juga akan meningkat (Anderson, Wallace, & Warner, 1986).

2. Pengaruh Pendapatan Perkapita Daerah Terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP

Hasil penelitian uji statistic dalam tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi Pendapatan Perkapita adalah sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,10, yang menunjukkan bahwa pengaruh signifikan antara pendapatan perkapita daerah terhadap efektivitas pendapatan pajak di KPP yang berarti H2 diterima dan H0 ditolak. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tahwin (Tahwin, 2013) dan Norman Duma Sitinjak (Sitinjak, 2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan dari pendapatan perkapita akan meingkatkan pendapatan pajak, hal ini dikarenakan apabila pendapatan perkapita meningkat maka pendapatan pajak akan meningkat hal ini

dikarenakan ketika pendapatan perkapita meingkat maka menunjukkan bahwa pendapatan dari masyarakat juga meningkat maka akan meningkatkan PPH yang dapat dipungut selain itu dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan juga meningkatkan konsumsi terhadap barang dan jasa yang akan juga meningkatkan PPN yang dapat dipungut sehingga pendapatn perkapita juga akan meningkatkan efektifitas pendapatan pajak, selain itu dengan meningkatnya pendapatan perkapita akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, menurut pendapat dari Musgraves (Musgrave & Musgrave, 1989) menyatakan bahwa meningkatnya pendapatan maka akan meningkatkan pendapatan pajak, hal ini dikarenakan pemungutan pajak personal/individu didasarkan pada perhitungan pendapatan (PPH) atau konsumsi (PPN) dan menurut musgraves pajak yang berasal dari penghasilan dapat menyumbang lebih besar dikarenakan pajak berasal dari konsumsi dapat dihindari oleh pembayar pajak dengan menghentikan/menekan pembelian terhadap konsumsi barang/jasa.

3. Varians Belanja KPP Terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP

Hasil penelitian uji statistik dalam tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi Varians Belanja adalah sebesar 0,829 yang berarti lebih besar dari nilai 0,10, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara Varians Belanja KPP terhadap efektivitas pendapatan pajak di KPP yang berarti H_0 diterima dan H_3 ditolak. Berdasarkan penelitian Syukriy Abdullah (Abdullah, 2015) bahwa tidak terdapat pengaruh antara varians anggaran belanja terhadap varians pendapatan (efektivitas) sehingga dapat disimpulkan besar atau kecilnya peningkatan varians belanja tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan efektivitas dalam memungut pendapatan pajak hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak adalah self assessment system yang berarti bahwa wajib pajak sendiri yang melakukan kegiatan menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri sehingga peningkatan efektivitas penyerapan belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak, selain itu dikarenakan prinsip dari anggaran belanja menggunakan asas maksimal sedangkan penganggaran/penentuan target dari dari pendapatan menggunakan asas minimal dimana asas maksimal belanja menentukan bahwa penargetan belanja dilakukan secara maksimal yang dapat dianggarkan sehingga tidak mungkin melebihi penganggaran sedangkan pendapatan ditargetkan lebih rendah dari kemampuan sebenarnya/kemampuan maksimal yang bisa dipungut, hal ini yang menjadi kerentanan dalam pemanipulasian target anggaran seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Alan G. Maype, dkk (Mayper, Granof, & Giroux, 1991) bahwa varians anggaran sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga rentan untuk dimanipulasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pandangan baik masyarakat, sehingga varians anggaran tidak menunjukkan nilai sebenarnya kinerja dari pemerintahan, sehingga naik turunnya dari varians anggaran tidak akan berpengaruh.

5.5 Penutup

5.5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut signifikansi Pendapatan Perkapita adalah sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,10, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara General Government Spending terhadap efektivitas pendapatan pajak di KPP yang berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Nilai signifikansi Pendapatan Perkapita adalah sebesar 0,092 yang berarti lebih besar dari nilai 0,10, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara

pendapatan perkapita daerah terhadap efektivitas pendapatan pajak di KPP yang berarti H_0 diterima dan H_2 ditolak. nilai signifikansi varians belanja adalah sebesar 0,892 yang berarti lebih besar dari nilai 0,10, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara Varians Belanja KPP terhadap efektivitas pendapatan pajak di KPP yang berarti H_0 diterima dan H_3 ditolak.

5.5.3 Implikasi, Keterbatasan dan Saran

Dalam penelitian ini terdapat implikasi secara teoritis dan praktis, secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara variabel *government spending* dan pendapatan pajak serta penelitian ini mendukung teori *displacement effect* dengan menunjukkan ada pengaruh antara *general government spending* terhadap efektivitas pendapatan pajak di KPP, secara praktis dapat digunakan sebagai pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penggunaan belanja yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling membuat sampel penelitian ini kurang mampu menggeneralisasi populasi penelitian, serta sampel yang diambil dibatasi dengan kurangnya data yang tersedia terhadap produk domestik regional bruto di setiap kabupaten atau kota sehingga penelitian ini hanya berfokus pada daerah provinsi yang terdapat data, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian terhadap kabupaten/kota pada provinsi lainnya. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penambahan belanja pemerintah yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel yang digunakan serta melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap kabupaten atau kota pada provinsi lainnya.